



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KORELASI PENGATURAN
PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (*CROSS HOLDING*) DENGAN
*PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE***

TESIS

**SRI IRMIATI
NPM : 0606009282**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI TAHUN 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KORELASI PENGATURAN
PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (*CROSS HOLDING*) DENGAN
*PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**SRI IRMIATI
NPM : 0606009282**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI TAHUN 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar.**

Nama : SRI IRMIATI

NPM : 0606009282

Tandatangan :

Tanggal : 7 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **SRI IRMIATI**
NPM : **0606009282**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Atas Korelasi Pengaturan Pasal 36 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (*Cross Holding*) Dengan *Piercing The Corporate Veil Doctrine***

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: **RAHMAT S.S. SOEMADIPRADJA, S.H., LL.M.**

()

Penguji : **Dr. Drs. WIDODO SURYANDONO, S.H., M.H.**

()

Penguji : **PRAHASTO PAMUNGKAS, S.H., LL.M.**

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta Pembimbing Teknis, yang telah memberikan masukan-masukan dalam hal teknis serta penulisan.
2. Bapak Rahmat S.S. Soemadipradja, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Materi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang berharga untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.
3. Bapak Prahasto Pamungkas, S.H., LL.M., yang pada saat pengujian telah memberikan masukan-masukan dan data penting untuk melengkapi Tesis ini.
4. Kedua orangtua saya, Sumaryo Yuswopranyoto (Alm) dan Agustina Sumarwati (Almh) serta Kakak-Kakak dan seluruh keluarga yang terus memberikan doa, dukungan dan semangat yang sangat berharga.
5. Anak saya, A. Mahir Mayanto, S.H., yang tidak henti-hentinya dan terus memberikan doa, dukungan dan semangat yang tidak terhingga, serta membantu mengumpulkan data-data untuk keperluan penulisan Tesis ini.
6. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Depok, 7 Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

=====

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI IRMIATI**
NPM : **0606009282**
Program Studi : **Pasca Sarjana - Magister Kenotariatan**
Fakultas : **Hukum**
Jenis karya : **Tesis**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Atas Korelasi Pengaturan Pasal 36 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (*Cross Holding*) Dengan *Piercing The Corporate Veil Doctrine*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 7 Januari 2010
Yang menyatakan

(**SRI IRMIATI**)

ABSTRAK

Nama : SRI IRMIATI
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Atas Korelasi Pengaturan Pasal 36 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (*Cross Holding*) Dengan *Piercing The Corporate Veil Doctrine*.

Penelitian ini menelaah tentang ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara khusus melarang pemilikan saham secara *cross holding* oleh perseroan terbatas, dan kajiannya dilakukan dengan mempergunakan pendekatan teori *piercing the corporate veil* dan prinsip-prinsip *good corporate governance*, Khusus dalam menelaah tentang pelaku pelanggaran, yang dapat dilakukan oleh pemegang saham suatu perseroan terbatas yang ingin menjalankan bisnisnya tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau justru bahkan dilakukan oleh direksi dan/atau komisaris, dengan asumsi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 UUPT memperlihatkan adanya faktor kepentingan yang sangat melekat didalamnya, namun penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan contoh-contoh kasus mengingat transaksi semacam ini tergolong sebagai transaksi yang *highly classified*, meskipun dalam tatanan akademis penulis tidak memiliki akses sepenuhnya terhadap perseroan-perseroan yang melakukan transaksi semacam ini. Selain itu penggunaan teori *piercing the corporate veil* dan prinsip-prinsip *good corporate governance* bertujuan untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang harus dan dapat dibebani tanggung jawab atas pelanggaran Pasal 36 UUPT, termasuk uraian terhadap kerugian ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh para pelakunya terhadap teori dan prinsip-prinsip dalam bidang hukum perusahaan, khususnya terhadap perlindungan yang harus diberikan kepada para *stakeholders*. Pemaparan ini juga memberikan wawasan bahwa peran profesi penunjang dalam penegakkan Pasal 36 UUPT ini tergolong signifikan.

Kata kunci:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, *cross holding*, *piercing the corporate veil*.

ABSTRACT

Name : SRI IRMIATI
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Judicial Review On Governing Correlation In Article 36 Of Law No. 40 Of 2007 On Limited Liability Company (Cross Holding) With Piercing The Corporate Veil Doctrine.

This research is about provision of Article 36 Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company (UUPT), specifically provides that limited liability company is prohibited from having cross-holding shares, and it was made by using the approach of piercing the corporate veil theory and good corporate governance principles, especially the study on lawbreaker, he may be a shareholder of a limited liability company who wants to run his business without observing the prevailing laws and regulations, or even it is made by the Board of Directors and/or of Commissioners thereof, and the assume is the breach of the provision of Article 36 UUPT, it will be increasingly revealed due to the interest factor associated with it. This research is not aimed at giving case examples noting that such transaction is as highly classified transaction, even in the academic rules, the author has no full-access to the corporations making such transaction. The use of piercing the corporate veil theory and good corporate governance principles are also aimed at identifying those who must and may be responsible for the breach of Article 36 UUPT including explaining about damages or breach made by doers to the theory and principles in the field of corporation law, especially the protection that must be given to stakeholders. This explanation also gives insight that the profession role is significant to whether Article 36 this UUPT is enforced.

Key words:

Law No.40 of 2007, crossholding, piercing the corporate veil.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	v
Abstrak/Abstract	vi
Daftar Isi	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Metode Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab 2 Tinjauan Yuridis Atas Korelasi Pengaturan Pasal 36 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (<i>Cross Holding</i>) Dengan <i>Piercing The Corporate Veil Doctrine</i>	11
2.1. Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i>	11
2.1.1. Tanggung Jawab Hukum dari suatu Perseroan yang tidak berbentuk Badan Hukum	16
2.1.2. Tanggung jawab Hukum dari suatu Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum	17
2.2. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	25
2.2.1. Definisi	25
2.2.2. Dasar Pemikiran <i>Good Corporate Governance</i>	29
2.3. Pasal 36 UUPA dalam Korelasinya dengan Teori <i>Piercing the Corporate Veil</i> dan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	38
2.4. Analisis Tinjauan Yuridis Atas Korelasi Pengaturan Pasal 36 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (<i>Cross Holding</i>) Dengan <i>Piercing The Corporate Veil Doctrine</i>	57

2.4.1.	Korelasi Ketentuan Pasal 36 UUPt Memiliki yang Signifikan dengan <i>Piercing The Corporate Veil Doctrine</i> Terkait Transaksi Struktur <i>Cross Holding</i>	57
2.4.2.	Implementasi Maupun Penegakkan Ketentuan Pasal 36 UUPt	61
Bab 3	Penutup	63
3.1.	Kesimpulan	63
3.2.	Saran	65
	Daftar Pustaka	67

